

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPEGARUHI TUNGGAKAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

S K R I P S I

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Serjana S1
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara
Universitas Islam Negeri Sultan Syarik Kasim Riau*



Disusun Oleh:

SUHAENI
10675005090

PROGRAM S1

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU/RIAU**

2010

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

**Oleh: Suhaeni
NIM: 10675005090**

Penelitian ini dilaksanakan pada masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Yakni setelah seluruh data diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Kemudian data dianalisa secara deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga yang juga merupakan Wajib Pajak sebanyak 71820 jiwa. Mengenai besarnya jumlah populasi tersebut, demi untuk menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik sampling incidental yakni penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dengan menggunakan rumus Slovin dengan taraf kesalahan 5% sehingga didapat sebanyak 398 jiwa.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran PBB adalah: kesadaran masyarakat yang kurang baik karena belum mengetahui tentang arti pentingnya PBB, kemampuan masyarakat untuk membayar yang masih rendah, pelayanan jasa pemerintah atau aparatur terkait yang masih belum berjalan dengan efektif dan efisien, serta tingkat kelalaian masyarakat yang sangat tinggi sehingga kurang termotivasi untuk membayar PBB.

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi DISPENDA kota Pekanbaru agar lebih memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti penting membayar PBB, memberikan tarif yang sesuai ukurannya dengan objek pajak, pelayanan jasa yang diberikan harus lebih prima dan dapat berjalan dengan efektif serta sesuai dengan sistem dan prosedur pembayaran PBB yang telah ditetapkan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	8
I.3 Tujuan Penelitian.....	8
I.4 Manfaat Penelitian.....	9
I.5 Sistematika penulisan.....	10
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	13
2.1 Pajak.....	13
2.2 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	27
2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	33
2.4 Prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.....	37
2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	38
2.6 Defenisi Operasional.....	41
2.7 Teknik Pengukuran.....	42
2.8 Hipotesis.....	49
2.9 Variabel Penelitian.....	50
BAB.III METODOLOGI PENELITIAN.....	51
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	51
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	51
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4 Populasi dan Sampel.....	53
3.5 Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	57
4.1 Keadaan Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	57
4.2 Tugas Pokok, Fungsi, dan Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	59
4.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja.....	62
4.4 Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.....	65

BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
5.1	Identitas Responden.....	70
5.2	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).....	73
5.3	Usaha-usaha yang Dilakukan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru.....	110
5.4	Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.....	111
BAB VI	PENUTUP.....	112
VI. A.	Kesimpulan.....	112
VI. B.	Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....		117
BIODATA PENULIS		
LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pembayaran pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis-jenis pajak yang sangat potensial dan strategis sebagai sumber penghasilan Negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi Negara yang cukup potensial dan kontribusi terhadap pendapatan negara jika dibandingkan dengan sektor pajak lainnya. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut tidak lain karena objeknya meliputi seluruh bumi dan

bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI).

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negara dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak.

Penerimaan negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindung. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintah saja yang mempunyai tanggung jawab.

Penyediaan kebutuhan seperti jalan, taman, sarana pelayanan umum lainnya memerlukan biaya yang dipungut dari warga negara/ masyarakat yang memanfaatkan dalam bentuk pajak. Pajak mempunyai fungsi antara lain adalah:

- a. Penerimaan negara dalam rangka membiayai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah.
- b. Pemerataan pendapatan masyarakat
- c. Stabilitas ekonomi (misalnya pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi.

Pajak sebagai penerimaan Negara tampaknya sudah jelas bahwa apabila pajak ditingkatkan maka penerimaan Negara pun meningkat, sehingga Negara dapat berbuat lebih banyak untuk kepentingan masyarakat. Sebagai pemerataan pendapatan masyarakat, kenyataan menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat masih banyak terdapat kesenjangan antara warga negara yang kaya dan yang miskin. Pajak adalah salah satu alat untuk dapat meredistribusi pendapatan dengan cara memungut pajak yang lebih besar bagi warga yang berpendapatan tinggi dan memungut pajak yang lebih rendah bagi warga yang berpendapatan kecil.

Masalah yang sangat penting dari suatu daerah pada daerah otonomi sekarang ini adalah bagaimana daerah mengoptimalkan penggalan sumber-

sumber keuangan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan di daerah. Salah satu sumber pendapatan yang dapat digali oleh pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan, sekaligus status Pajak Bumi dan Bangunan bukan Pajak Daerah namun kontribusi terhadap pendapatan daerah tidak sedikit melalui sistem bagi hasil pajak ini.

Upaya peningkatan penghasilan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk membangkitkan kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran secara tepat waktu dan tidak melakukan tunggakan. Partisipasi pada dasarnya merupakan bentuk keikutsertaan orang atau kelompok masyarakat terhadap satu kegiatan yang didasarkan pada suatu kesadaran akan hasil yang diperolehnya. Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan instansi terdepan dalam melakukan pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah kepala desa dan kepala lurah. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, ada beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Aspek perencanaan dalam hal ini petugas perlu melihat waktu yang tepat dalam melakukan penagihan bagi masyarakat pada umumnya. Sementara dari aspek pelaksanaan dalam hal ini aparat perlu melakukan pendekatan persuasif, memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai pentingnya pajak tersebut dibayarkan, dan yang terakhir adalah pengawasan dalam hal ini perlu dilakukan

pengawasan terhadap petugas yang memungut maupun masyarakat. Dalam hal ini perlu diperhatikan adalah tertib administrasi dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang diperoleh oleh daerah, sebagaimana banyak terlihat masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada di dalamnya terutama masih banyaknya masyarakat yang melakukan tunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah sering melakukan suatu teknik pemberian motivasi pada pemerintah bawahannya seperti camat, kepala lurah dan desa dengan memberikan penghargaan bagi mereka yang berhasil memenuhi target pencapaian pajak bumi dan bangunan dalam tahun pajak berjalan. Namun berkaitan dengan hal tersebut, banyak kejanggalan yang ditemukan di lapangan dan sudah menjadi rahasia umum seringkali kepala desa/lurah melunasi sendiri Pajak Bumi dan Bangunan dari uang pribadi atau kas desa untuk menutupi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebelum masa akhir pembayaran pajak. Kondisi demikian menunjukkan bahwa masih rendah partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Untuk melihat gambaran tentang Wajib Pajak PBB dapat di lihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Jumlah Wajib Pajak.

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2005	158.321
2	2006	159.748
3	2007	161.400
4	2008	176.349
5	2009	179.549

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak PBB yang membayar Pajak makin meningkat dari tahun 2005-2009. hal ini disebabkan karena jumlah penduduk Pekanbaru yang makin meningkat dan banyak yang menetap di Pekanbaru.

Melihat kondisi di atas, peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Pekanbaru dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan adanya peningkatan kesadaran pada masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak, khususnya mengenai banyaknya jumlah tunggakan pajak.

Adapun gambaran jumlah tunggakan pembayaran PBB pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Pekanbaru tahun 2006-2008 dapat dilihat pada tabel 1.2:

Tabel 1.2 : Jumlah Tunggakan Wajib Pajak

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2005	63.329
2	2006	63.899
3	2007	64.560
4	2008	70.540
5	2009	71.820

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dari tabel 1.2 dapat kita lihat, bahwa jumlah tunggakan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2005 jumlah tunggakan sebanyak 63.329 Wajib Pajak, pada tahun 2006 terdaftar 63.899 Wajib Pajak yang menunggak, pada tahun 2007 jumlah tunggakan sebanyak 64.560, dan pada tahun 2008 jumlah Wajib pajak yang melakukan tunggakan sebanyak 70.540, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 71.820.

Berkaitan dengan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut secara mendalam dengan menetapkan judul ” **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah: ” **Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru? ”**

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah, tentunya mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh aparat pemungut pajak (Unit Pelaksana Tekhnis) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan partisipasi masyarakat setempat sehingga masyarakat dengan sendirinya mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tepat pada waktunya, sehingga tidak terjadi tunggakan.

3. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan dan penerapan serta pengembangan ilmu-ilmu sosial yang telah di dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau dan dapat mengetahui permasalahan apa saja yang terjadi pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru khususnya di dalam menangani permasalahan tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Sebagai bahan masukan, kajian dan informasi lebih lanjut bagi penulis lainnya yang ingin membahas kembali masalah ini di masa yang akan datang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membaginya menjadi beberapa bab, dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TELAAH PUSTAKA

Pengertian dan teori-teori yang mendasari masalah pokok penelitian ini, yaitu: Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sistem Pemungutan Pajak, Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan, Prosedur Pembayaran Pajak, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan, Teknik Pengukuran, Hipotesis, dan Variabel Penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini di uraikan tentang Keadaan umum kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota pekanbaru, Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Struktur organisasi dan uraian tugas satuan unit kerja, Keadaan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta Wilayah dan gambaran kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang Identitas Responden, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Usaha-usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tepat pada Waktunya sehingga tidak terjadi Tunggakan, serta Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diambil oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran penulis kepada objek penelitian guna melakukan perbaikan ke depannya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 PAJAK

A. Pengertian Pajak

Pada saat sekarang ini bangsa Indonesia mengalami imbas krisis ekonomi yang sepertinya tidak berkesudahan, dan hal inilah yang membuat Pemerintah mengambil kebijaksanaan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan besar bagi Negara.

Untuk mendukung kebijaksanaan tersebut Pemerintah perlu membuat langkah-langkah yang berhubungan dengan usaha peningkatan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan besar bagi Negara.

Sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari tentang pajak. Secara umum pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembangunan umum.

Pajak yang dipungut oleh Negara digunakan untuk menjalankan Pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu penghidupan bangsa.

Banyak definisi yang dikemukakan oleh ahli perpajakan yang satu sama lain berlainan tetapi pada dasarnya mempunyai arti dan tujuan yang sama.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (tidak dipaksakan) tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditumpuk dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2003 :1)

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro. S.H pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak adalah penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh Pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat. (Siahaan, 2005 :5).

Pengertian pajak menurut Philip E. Taylor dalam buku " The Economic of Public finance " memberikan batasan pajak seperti di atas hanya menggantikan without reference dengan with little reference.

Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldman dalam buku Over Heidmiddelen Van Indonesia yang mana terjemahannya, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pegusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Prof. Dr. P.J. Andriani pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) terutama oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara menyelenggarakan pemerintah.

Dari defenisi-defenisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pajak adalah dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang
2. Dalam pembayaran pajak tidak terdapat jasa timbal balik atau serta aturan pelaksanaannya.kontraprestasi individu dari Pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

4. Pajak diperuntukkan untuk membiayai rumah tangga Negara.
5. Pajak tidak saja berfungsi memasukkan uang sebanyak-banyak ke dalam kas Negara atau budgeter, tapi juga memiliki fungsi mengatur atau non budgeter.

Ada beberapa jenis pajak yang terdapat di Indonesia, baik yang masih berlaku maupun yang tidak berlaku lagi.

1. Pajak Pusat (Wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)
 - a. Penghasilan (Pph) : berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.
 - b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
 - c. Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah (PPnBM), berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.

- d. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000.
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTP- mulai berlaku tanggal 9 Juli 1998); berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000.
 - f. Bea Materai; berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
 - g. Bea Masuk; berdasarkan Uudang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean.
 - h. Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol beserta HasilOlahannya; berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai
2. Pajak Daerah (Wewenang pemajakannya berada ditangan pemerintah daerah)

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai pembangunan daerah. Yang termasuk dalam penerimaan pendapatan pajak daerah adalah semua yang terdapat di dalam kawasan daerah tersebut yang bias dijadikan sebagai sumber pendapatan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Adapun bentuk dari pajak daerah tersebut adalah:

- a. Pajak Hotel dan Restoran
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Reklame
- d. Pajak Hiburan
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir

g. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Dari semua jenis pajak yang telah di paparkan di atas khususnya di Indonesia. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak yang sebagian penerimaannya dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten/ Kota.

Penerimaan Negara maupun suatu daerah tidak hanya berasal dari pihak Pemerintah melalui sumber kekayaan alami, hasil perusahaan Negara/ Daerah atau pinjaman dan lainnya juga berasal dari partisipasi masyarakat berupa pajak-pajak yang harus di bayar sesuai peraturan yang berlaku, dalam artian pemungutan berbagai jenis pajak yang didasarkan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 telah membawa perubahan yang sangat penting terhadap pengelolaan perpajakan sebelumnya serta dapat mencabut peraturan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang, termasuk pajak kebendaan/ kekayaan atas harta benda yang telah

dilakukan perbaikan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1983 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga ketentuan Undang-undang terdahulu tidak berlaku lagi.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pengganti pajak kekayaan, pajak rumah tangga dan pajak lainnya serta iuran pembangunan daerah, maka pemerintah telah mengambil kebijakan mengenai hasil pemerintahan Pajak Bumi dan Bangunan yakni dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta diperkuat oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan ketentuan sebagai berikut:

Dana bagi hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% untuk daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2 % untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah provinsi.
- b. 64,8 % untuk daerah Kabupaten, kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah Kabupaten, kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas umum daerah kabupaten.

- c. 9 % untuk biaya pemungutan.

Sedangkan 10 % bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagikan kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65 % dibagikan secara merata kepada seluruh daerah Kabupaten dan Kota
- b. 35 % di bagikan secara intensif kepada daerah Kabupaten dan Kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai rencana penerimaan sector tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah, karena sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subyek dan obyek Pajak Bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber pembiayaan pembangunan.

Dalam pembayaran pajak, peranan pemerintah di dalam penerimaan pajak dari masyarakat sangat penting sekali, dan salah satu instansi pemerintahan yang mempunyai hak dan wewenang di dalam pemungutan pajak pada masyarakat adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (KADISPENDA).

B. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- Fungsi Anggaran (budgetair)

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bias dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi Mengatur (regulerend)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.

- Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

- Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.2 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Pembangunan Nasional adalah sebuah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Apabila membahas masalah pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodoharjo (dalam Waluyo, 2007: 2)” Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan)

yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan atau bangunan. Pajak ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan pemungutan dan pengalokasiannya oleh pusat di karenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintah daerah tidak memutuskan Pajak Bumi dan Bangunan atas kemauannya sendiri.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dikenakan karena pemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada seseorang yang mengaitkan bukti kepemilikan tanah dengan SPOP/SPPT Pajak Bumi dan Bangunan, jelas kurang tepat, karena Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti hukum kepemilikan, hanya kewajiban pajak tanah dan bangunan, bagi siapapun yang menempati per 1 januari. (Setiawan, Agus, 2006 : 325).

A. Dasar Hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/ KMK. 04/ 2000 tentang penyesuaian Besarnya NJOPTKP sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- c. Peraturan Pemerintah. Nomor 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/ KMK. 03/ 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/ KMK. 04/ 2002 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1002/ KMK. 04/ 1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- f. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/ KMK. 04/ 1985 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Penunjukan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.

g. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/ KMK. 04/ 1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.

h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 523/ KMK. 04/ 1998 tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.

B. Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pada dasarnya, yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambakpengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan. Termasuk dalam pengertian bangunan di sini adalah:

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan komplek bangunan tersebut;
- Jalan tol;
- Kolam renang;

- Pagar mewah;
- Tempat olahraga;
- Galangan kapal, dermaga;
- Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

C. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memiliki, menguasai, atau memperoleh manfaat atas bangunan, yang meliputi antara lain pemilik, penghuni, pengontrak, penggarap, pemakai, dan penyewa.

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya.

(Rimsky K. Judisseno, 2005: 359) bahwa bumi terdiri atas:

- a. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia.
- b. Tubuh bumi yang ada di bawahnya.

Menurut ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi atau tanah;
2. Memperoleh manfaat atas bumi atau tanah;
3. Memiliki, menguasai, atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

D. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan. Dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam penghitungan pajak yang terutang digunakan tariff pajak. Yang dimaksud dengan tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam persentase. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,5 % (lima persepuluh persen).

E. Dalil Syari'at

Pada dasarnya pajak di dalam agama Islam hanya diperuntukkan bagi non muslim, sedangkan bagi umat muslim sendiri dikenal dengan adanya zakat.

Adapun dalil Al-Qur'an yang mewajibkan bagi non muslim membayar pajak adalah Surat At-Taubah Ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya:

“ Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk”.

2.3 SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Secara tradisional, pemungutan pajak dianggap mempunyai tujuan ganda yaitu penerimaan (Revenue; Budgetary) dan pengaturan (Regulatory). Selanjutnya Musgrave dalam bukunya Public Finance In Theory and Practice (1984) menyebutkan tujuan kebijakan perpajakan meliputi 3 aspek yaitu:

- Alokasi
- Distribusi
- Stabilisasi

Dalam fungsi budgetnya pajak dimanfaatkan sebagai instrumen pengumpul dana (Money Making Machine) untuk pembiayaan kegiatan (rutin dan pembangunan) pemerintah. Dari pajak sangat diharapkan menghasilkan penerimaan yang pantas (equity) dan stabil secara kontiniu. Sebagai instrument pengatur, pajak dimaksudkan untuk dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat misalnya untuk menuju pertumbuhan ekonomi, redistribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi.

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu:

1. Official- Assesment System

Adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self- Assesment System

Adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak menentukan besarnya pajak terutang, tetapi bersifat mengawasi dan mengoreksi penghitungan yang disajikan oleh Wajib Pajak.

3. Semi Self- Assesment and With Holding System

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus dan bukan Wajib Pajak) yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Tata cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak yang dilakukan dalam berbagai tingkatan system pemungutan berdasarkan atas stelsel-stelsel yaitu:

1. Stelsel Nyata (Riel Stelsel)

Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan.

2. Stelsel Anggapan (Fictieve Stelsel)

Dalam stelsel ini pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak, karena berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak (WP). Anggapan ini dapat menggunakan perbandingan data antara penerimaan pendapatan Wajib Pajak pada tahun sebelumnya yang dianggap sama dan pendapat yang akan di peroleh pada tahun sekarang

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang

didasarkan pada suatu kenyataan, sehingga menurut Stelsel ini akan terjadi perhitungan kembali untuk menentukan masalah lebih atau kekurangan pajak.

2.4 PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dilakukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Pelunasan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan berdasarkan Surat Tagihan Pajak(STP).

- Pelunasan atau Pembayaran Pajak berdasarkan SPPT

Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambatlambatnya enam bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Misalnya, Wajib Pajak Wibisono menerima SPPT pada tanggal 1 April 2001, maka tanggal jatuh tempo pembayaran atau pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan adalah tanggal 30 September 2001.

- Pelunasan atau Pembayaran Pajak berdasarkan SKPKB

Pajak yang terutang berdasarkan SKPKB harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan Pajak oleh Wajib Pajak. Misalnya, SKPKB diterima oleh Wajib Pajak tanggal 1 Agustus 2001, maka jatuh tempo pembayaran pajak adalah tanggal 31 Agustus 2001.

- Pelunasan atau Pembayaran berdasarkan STP

Pajak Bumi dan Bangunan terutang yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak. STP dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak yang tidak melunasi atau kurang membayar pajak terutang dalam SPPT/SKPKB pada saat jatuh tempo.

Pajak yang terutang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2 persen sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 bulan.

2.5 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUNGGAKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

Penarikan atau pemungutan pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi esensial. Tetapi masih ada kendala dalam pemungutan pajak tersebut, yaitu masih banyaknya tunggakan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Prof. W. J. de Langen yang dikutip oleh Bohari, ini dipengaruhi oleh:

a. Kesadaran

Rendahnya kesadaran warga Negara untuk membayar pajak kepada Negara banyak ditentukan oleh sejauh mana rakyat dapat mengenal dan menikmati manfaat jasa-jasa dari Negara. Kesadaran membayar pajak juga dipengaruhi oleh efisiensi dan efektifitas kegiatan pemerintah.

b. Kemampuan untuk Membayar (Ability to Pay)

Kekuatan untuk membayar uang kepada Negara, biasanya dipengaruhi oleh pendapatan, kekayaan, serta susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.

c. Pelayanan Jasa (Public Service)

Pemerintah memberikan pelayanan jasa kepada warganya baik secara perorangan maupun kolektif, dan warga Negara memberikan kontraprestasi kepada pemerintah berupa uang dalam bentuk pembayaran pajak.

d. Kelalaian

Menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

Adapun asas-asas yang dapat dijadikan alas, dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan yang dikemukakan oleh Adam Smith adalah sebagai berikut:

1. Equality (asas persamaan)

Asas ini menekankan bahwa pada warga Negara atau wajib tiap Negara seahrusnya memberikan sumbangannya kepada Negara sesuai dengan kemampuannya.

2. Certainty (asas kepastian)

Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah dan cara pembayaran pajak.

3. Conveniency of Poyment (asas menyenangkan)

Pajak harusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak.

4. Low Cost of Collection (asas efisiensi)

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan Anggaran Belanja Negara (Bohari, 2006: 41).

Lazimnya suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil atau tidaknya suatu pemungutan pajak.

2.6 DEFENISI OPERASIONAL

Menurut Mochtar Mas'ood (2004:90) definisi operasional adalah serangkaian prosedur yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan kala kita hendak mengetahui eksistensi empiris atau derajat eksistensi suatu konsep. Pengertian operasional secara sederhana adalah penjelasan tentang indikator-indikator pengukur dari suatu variabel.

Untuk pengukuran kesamaan pandangan dan memudahkan analisa, dalam artian ada atau tidaknya masyarakat yang melakukan tunggakan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka penulis akan memberikan batasan secara jelas mengenai ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, ada beberapa variabel yang akan dijadikan sebagai tolak ukur dari penelitian ini, yaitu:

1. Kesadaran
2. Kemampuan untuk Membayar (Ability to Pay)
3. Pelayanan Jasa (Public Service)
4. Kelalaian

2.7 TEKNIK PENGUKURAN

Agar penelitian menjadi lebih baik dan ilmiah serta diakui kebenarannya maka perlu digunakan suatu pengukuran agar tidak terjadi suatu kesalahan nantinya di lapangan. Dalam teknik pengukuran ini, penulis mencoba mengukur melalui variabel-variabel yang ada di dalam defenisi operasional.

1. Kesadaran

Rendahnya kesadaran masyarakat di dalam membayar pajak sangat mempengaruhi dan menentukan tinggi atau rendahnya pendapatan dari PBB.

Maka dari itu sangat diperlukan sekali partisipasi masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Adapun indikator dari variabel ini adalah:

- a. . Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa dana dari setiap pembangunan yang ada di daerah berasal dari pembayaran pajak masyarakat.
- b. Aparat atau petugas harus senantiasa mandata Wajib Pajak yang melakukan tunggakan dan Wajib Pajak yang membayar tepat pada waktunya.
- c. Pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat sangat berperan penting di dalam meningkatkan pendapatan daerah.
- d. Pemerintah harus memberikan penyuluhan akan arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan baik melalui media massa maupun media
- e. Pemerintah harus memberikan teguran atau sanksi bagi masyarakat yang melakukan tunggakan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Pengukurannya:

Sangat Baik : Apabila dalam faktor kesadaran kelima sub indikatornya terpenuhi.

Baik : Apabila dalam faktor kesadaran hanya terpenuhi empat sub indikatornya.

Netral : Apabila dalam faktor kesadaran hanya tiga sub indikator yang terpenuhi

Tidak baik : Apabila dalam faktor kesadaran hanya dua sub indikator yang terpenuhi.

Sangat tidak baik : Apabila dalam faktor kesadaran hanya satu sub indikator yang terpenuhi.

2. Kemampuan untuk Membayar (Ability to Pay)

Keadaan masyarakat yang mayoritasnya berpenghasilan menengah ke bawah, banyak membuat masyarakat tidak sanggup untuk membayar pajak. Walaupun setelah di lapangan ada pembayaran pajak yang sangat relatif kecil yaitu Rp 3000 per tahun. Dengan terjadinya hal tersebut, maka pajak harus dikenakan kepada orang-orang pribadi yang sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara. Dengan system dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Adapun indikator dari variabel ini adalah:

- a. Pemerintah harus memberikan tarif pajak yang harus di bayar sesuai dengan ukuran objek pajak itu sendiri.
- b. Pemerintah harus segera mungkin mendata masyarakat yang merasa keberatan untuk membayar PBB, yang dalam hal ini terjadi karena tarif yang harus di bayar sangat besar.
- c. Masalah menghitung dan memungut pajak sepenuhnya terletak ditangan aparaturnya.
- d. Perhitungannya sederhana dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak sehingga memperkecil kemungkinan Wajib Pajak untuk tidak mampu membayar pajak akibat perhitungan yang terlalu besar.
- e. Wajib Pajak diperbolehkan menghitung dan membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, selama tarif pajak tersebut tidak berubah.

Pengukurannya:

Sangat Baik : Apabila dalam faktor kemampuan untuk membayar kelima sub indikatornya terpenuhi.

- Baik : Apabila dalam faktor kemampuan untuk membayar hanya terpenuhi empat sub indikatornya.
- Netral : Apabila dalam faktor kemampuan untuk membayar hanya tiga sub indikator yang terpenuhi
- Tidak baik : Apabila dalam faktor kemampuan untuk membayar hanya dua sub indikator yang terpenuhi.
- Sangat tidak baik : Apabila dalam faktor kemampuan untuk membayar hanya satu sub indikator yang terpenuhi.

2. Pelayanan Jasa (Public Service)

Pelayanan Jasa yang baik maka akan menimbulkan kepuasan bagi orang yang dilayani sehingga menghasilkan sebuah layanan yang prima. Kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan tepat pada waktunya akan terorganisir dengan baik.

Adapun indikator dari variabel ini adalah:

- a. Para petugas yang melakukan pemungutan pajak harus memperhatikan proses pembayaran PBB.

- b. Para petugas harus menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak kepada masyarakat.
- c. Di dalam melayani masyarakat petugas atau aparatur terkait harus memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat.
- d. Para petugas harus menyampaikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) dalam rangka pendataannya.
- e. Para petugas harus memberikan STP (Surat Tagihan Pajak) kepada masyarakat yang melakukan tunggakan.

Pengukurannya:

Sangat Baik : Apabila dalam faktor pelayanan jasa kelima sub indikatornya terpenuhi.

Baik : Apabila dalam faktor pelayanan jasa hanya terpenuhi empat sub indikatornya.

Netral : Apabila dalam faktor pelayanan jasa hanya tiga sub indikator yang terpenuhi

Tidak baik : Apabila dalam faktor pelayanan jasa hanya dua sub indikator yang terpenuhi.

Sangat tidak baik : Apabila dalam faktor pelayanan jasa hanya satu sub indikator yang terpenuhi.

3. Kelalaian

Setiap warga Negara wajib memberikan sumbangan kepada Negara sesuai dengan kemampuannya. Sehingga dapat dikatakan, bahwa masyarakat tidak boleh menolak pembayaran pajak yang telah ditetapkan dan menolak untuk memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya.

Adapun indikator dari variabel ini adalah:

- a. Bagi Wajib Pajak harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan pembayaran pajak yang harus di bayar
- b. Pajak harus dipungut pada waktu dengan cara yang paling baik agar Wajib Pajak senang untuk membayar pajak.
- c. Pemerintah harus menindaklanjuti masyarakat yang melakukan tunggakan lebih dari 3 kali.

- d. Pemerintah harus mengedarkan surat teguran bagi masyarakat yang melakukan tunggakan.
- e. Pemerintah harus menjalankan aturan yang maksimal (denda 2%) bagi masyarakat melakukan tunggakan.

Pengukurannya:

Sangat Baik : Apabila dalam faktor kelalaian kelima sub indikatornya terpenuhi.

Baik : Apabila dalam faktor kelalaian hanya terpenuhi empat sub indikatornya.

Netral : Apabila dalam faktor kelalaian hanya tiga sub indikator yang terpenuhi

Tidak baik : Apabila dalam faktor kelalaian hanya dua sub indikator yang terpenuhi.

Sangat tidak baik : Apabila dalam faktor kelalaian hanya satu sub indikator yang terpenuhi.

2.8 HIPOTESIS

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, dan di dukung oleh teori-teori yang dapat dirumuskan dari suatu hipotesis dan dapat dianggap sebagai suatu kesimpulan sementara yaitu **di duga masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.**

2.9 VARIABEL PENELITIAN

Secara teoritis variabel dapat di definisikan sebagai atribut seseorang, atau obyek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. (Hatch dan Farhady, dalam Sugiyono, 2006 : 38). Sedangkan menurut F.N Karlenger (Arikunto, 2002 : 94) ia menyebutkan bahwa variabel sebagai sebuah konsep seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep kesadaran.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulan. Adapun variabel dari penelitian ini adalah:

- a. Kesadaran
- b. Kemampuan Untuk Membayar (Ability to Pay)
- c. Pelayanan Jasa (Public Service)

Kelalaian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tepatnya pada bulan November 2009 sampai Februari 2010 mendatang.

3.2 JENIS DAN SUMBER DATA

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah dengan mengambil data yang dibutuhkan sesuai dengan penelitian yaitu berupa Tanya jawab dengan pimpinan serta karyawan pada perusahaan yang diteliti, misalnya interview secara langsung ke lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam bentuk yang sudah jadi, diperoleh dari

berbagai sumber baik berupa laporan, maupun informasi dari pihak instansi atau pihak yang berhubungan, seperti Sejarah umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Struktur Organisasinya.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu:

a. Library research yaitu dengan mempelajari dan membaca karangan ilmiah serta buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini yang pada akhirnya hasil penelitian kepustakaan ini digunakan sebagai bahan perbandingan dengan kenyataan yang dijumpai dalam instansi tersebut.

b. Wawancara (interview) yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Dalam penelitian ini digunakan wawancara tak terstruktur di mana peneliti ingin menanyakan sesuatu secara lebih mendalam lagi pada seorang subjek tertentu.

- c. Observasi yaitu suatu bentuk observasi khusus di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang pasif, melainkan juga mengambil berbagai peran dalam situasi tertentu dan berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.
- d. Kuesioner atau angket merupakan kegiatan menyusun daftar pertanyaan tertulis sesuai dengan pokok permasalahan yang selanjutnya disebarkan kepada responden terpilih untuk diisi berdasarkan alternatif jawaban yang ada.

3.4 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. (Sugiyono, 2005: 72-73)

Berdasarkan pengertian di atas, maka penulis dapat menentukan populasi dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang fokus untuk menangani Pajak Bumi dan Bangunan sebanyak 6 orang, serta masyarakat Pekanbaru yang

telah melakukan tunggakan pada tahun 2009 sebanyak 71.820 orang dari jumlah penduduk yang terdaftar menjadi Wajib Pajak sebanyak 179.549 orang.

Mencermati banyaknya jumlah populasi yang ada, khususnya jumlah Wajib Pajak yang melakukan tunggakan, maka peneliti mengambil sampel dengan menggunakan *teknik sampling insidental* yakni penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Untuk Wajib Pajaknya penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus Slovin, di mana penetapan sampel mempertimbangkan batas ketelitian yang dapat mempengaruhi kesalahan pengambilan sampel populasi. Rumus Slovin tersebut adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

Dimana:

n : ukuran sampel

N: ukuran populasi

e: persen kelonggaran ketidakstabilan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat di toleri atau diinginkan.

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini sebesar 71.820 orang, maka dengan besarnya jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 5% dari populasi yang berjumlah 71.820 orang di dapat sampel sebanyak:

$$n = \frac{71820}{1 + 71820(5\%)^2}$$

$$n = \frac{71820}{1 + 71820(0,05)^2}$$

$$n = \frac{71820}{1 + 71820(0,0025)}$$

$$n = \frac{71820}{1 + 179,55}$$

$$n = \frac{71820}{180,55}$$

$$n = 397,7 = 398$$

Jadi dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 71.820 orang adalah sebanyak 398 orang. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah sampel dari tiap-tiap kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. I

Jumlah Populasi dan Sampel di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Populasi	Sampel	Taraf Kesalahan (%)
----	-----------	----------	--------	---------------------

1	Senapelan	1010	6	5
2	Lima Puluh	1474	8	5
3	Pekanbaru Kota	1372	8	5
4	Sail	1068	6	5
5	Payung Sekaki	19820	110	5
6	Marpoyan Damai	6169	34	5
7	Tampan	11021	61	5
8	Sukajadi	2152	12	5
9	Bukit Raya	7153	40	5
10	Rumbai Pesisir	7499	41	5
11	Tenayan Raya	8870	49	5
12	Rumbai	4212	23	5
Jumlah		71820	398	5

Sumber: Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Untuk menguji kebenaran penelitian secara empiris, karena penelitian ini berbentuk kualitatif, maka penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Yakni setelah seluruh data yang diperoleh terkumpul, data tersebut kemudian dikelompokkan menurut jenis dan macam data serta ditambahkan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian. Kemudian data dianalisa secara deskriptif yakni dengan cara memberikan gambaran secara umum mengenai variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4. 1. Keadaan Umum Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Dalam melaksanakan program-program kerja yang telah ditetapkan serta sebagai penunjang untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka kehadiran suatu organisasi atau suatu instansi mutlak di perlukan bahkan menjadi suatu keharusan yang harus dipenuhi, karena sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu wadah atau alat untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian pula halnya dengan kota Pekanbaru yang melakukan suatu program pembangunan daerah memerlukan money (modal) sebagai pembiayaan. Maka untuk mendapatkan money (modal) tersebut pemerintah kota Pekanbaru harus menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya melalui sektor pajak dan retribusi daerah. Disamping itu pemerintah kota Pekanbaru harus mempunyai suatu wadah atau instansi dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah secara khusus.

Wadah atau instansi yang dimaksud adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan

Daerah, bertugas menghimpun pendapatan khususnya dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), keberadaan dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam konteks penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai nilai yang sangat strategis. Dinas Pendapatan Daerah kota pekanbaru terletak di Jalan Jendral Sudirman No 464, tepat disamping kantor Walikota pekanbaru.

4.2. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dan fungsinya di berikan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008. berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki kedudukan, tugas dan fungsi yang harus di laksanakan semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

1. Kedudukan.

- a. Dinas Pendapatan Daerah Merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dibidang Pendapatan Daerah.
- b. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- c. Kepala inas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Sekretariat Dinas dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- e. Bidang dipimpin oleh kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- f. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- g. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- h. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota

Tugas Pokok dan Fungsi.

Kelembagaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru saat ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya namunada beberapa perubahan yang ikut mempengaruhi Struktur Organisasi Tata Laksana (SOT) Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 tentang uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah.
- b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan, kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pendapatan daerah.
- c. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang pendapatan daerah dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- d. Menyusun konsep Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di bidang pendapatan daerah.
- e. Mengatur relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Menetapkan target pendapatan daerah dan melaksanakan upaya pencapaian target yang ditetapkan.
- g. Intensifikasi dan eksentifikasi pendapatan daerah.
- h. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
- i. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah.
- j. Melaksanakan pelatihan dan pembimbingan teknis dibidang pendapatan daerah.
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Walikota.

Untuk menjalankan tugas pokoknya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijaksanaan;
- b. Pengambilan keputusan;
- c. Perencanaan;
- d. Pengorganisasian;
- e. Pelayanan umum dan teknis;
- f. Pengendalian/ pengarahan/ pembinaan dan bimbingan;
- g. Pengawasan;
- h. Pemantauan dan evaluasi;
- i. Pelaksanaan lapangan;
- j. Pembiayaan;
- k. Penelitian dan pengkajian;
- l. Pelaporan;

4. 3. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Satuan Unit Kerja.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diatas, maka untuk mencapai keberhasilan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru tidak terlepas dari keberadaan dan peranan berbagai unit kerja yang terstrukturisasi dalam susunan keorganisasian, karena untuk mempertahankan dan melangsungkan suatu organisasi adalah akibat dari kerja sama satuan-satuan kerja yang ada.

Dalam kata lain bahwa, untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat di bidang pendapatan daerah sekaligus pula dalam menyelenggarakan kewajiban manapun, amanat tanggung jawab penerimaan keuangan terdiri atas beberapa departemen atau unit-unit kerja yang terangkum dalam susunan organisasi sebagaimana yang dipaparkan dalam tulisan ini.

Jika dilihat dari masa kemasa, dapat dilihat bahwa organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan satuan unit kerja ataupun struktur organisasinya. Ini tidak lain dirubah berdasarkan perkembangan zaman dan bertujuan untuk melakukan penyederhanaan kerja pada organisasi dinas pendapan tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dengan didukung oleh struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;
2. Sekretaris, membawahi ;
 - a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dn Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

3. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi ;
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Penetapan;
 - c. Seksi Pemeriksaan.
4. Bidang Penagihan, membawahi;
 - a. Seksi Pembukuan, Verifikasi, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan;
 - c. Seksi Pengembangan Pendapatan, Retribusi dan Perhitungan.
5. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, membawahi;
 - a. Seksi Pendataan Usahaan Penerimaan Retribusi;
 - b. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain-lain;
 - c. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat-surat Berharga;
6. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi;
 - a. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - b. Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - c. Seksi Peraturan Perundang-Undangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dibentuknya struktur organisasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ini adalah untuk memberi batas kewenangan terhadap setiap bagian atau setiap bagian unit kerja yang ada, sehingga mereka dapat mempertanggung jawabkan apa yang dikerjakannya.

4. 4. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

Didalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Peran karyawan atau pegawai sangat penting untuk pencapaian tujuan tersebut. Yang mana para pegawai atau karyawan ini merupakan penggerak organisasi itu sendiri, bahkan merupakan syarat adanya suatu organisasi. Pegawai atau karyawan ini merupakan suatu sumber daya utama dalam menjalankan suatu organisasi.

Begitu pula halnya dengan dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru untuk mencapai tujuannya. Dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru memerlukan pegawai atau karyawan sebagai penggerak. Yang mana para pegawai ini tidak dilihat dari kuantitasnya melainkan sumber daya manusianya (SDM) yang meliputi, kemampuan bekerja, kecakapan bekerja, loyalitas, disiplin dan tanggung jawab didalam bekerja.

1. Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan.

Didalam suatu organisasi pendidikan bagi pegawai atau karyawan juga merupakan suatu hal yang mutlak untuk menjalankan organisasi tersebut.

Demikian pula halnya dengan dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru. Untuk menjalankan organisasinya memerlukan pegawai yang berpendidikan.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tingkat pendidikan seorang pegawai dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru sangat penting artinya di tengah upaya pencapaian tujuan organisasi. Karena dengan pendidikan yang ada pegawai mampu menguasai apa yang hendak dilakukannya secara efisien dan efektif.

Tabel IV.1 Keadaan Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan pada dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sarjana Strata 2	3	5,16
2	Sarjana Strata 1	30	51,60
3	Diploma III	3	5,16
4	SLTA	20	34,40
5	SLTP	2	3,44
Jumlah		58	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, 2010

Dari tabel diatas diketahui bahwa tingkat pendidikan pegawai yang ada pada dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru umumnya cukup bagus, yakni terdapat 3 orang (2,63 %) pegawai yang lulusan dari S2, 30 orang (51,60 %) pegawai yang lulusan S1, 3 orang (5,16 %) pegawai yang lulusan D III, 20 Orang (34,40 %) pegawai yang lulusan SLTA, dan 2 oran (3,44 %) pegawai yang lulusan SLTP.

2. Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan.

Pangkat dan golongan merupakan suatu penghargaan bagi pegawai pada dinas pendapatan daerah kota pekanbaru yang mana pangkat dan golongan ini diraih dari atau di berikan atas pendidikan yang dimiliki oleh pegawai tersebut, baik pendidikan formal maupun non-formal. Disamping diraih dari pendidikan, ketekunan dan masa kerja pegawai juga dapat memberikan pangkat dan golongan yang baik.

Hal demikian tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa tujuan seorang pegawai bekerja dengan tekun dan giat pada dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru adalah untuk mendapatkan imbalan yang sesuai atas kerja yang ia lakukan dalam hal ini berupa pangkat dan golongan.

Berikut ini dapat dilihat tabel pangkat dan golongan yang dimiliki pegawai Dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru :

Tabel IV. 2. Keadaan Pegawai menurut Pangkat dan Golongan pada Dinas Pendapatan Daeah Kota Pekanbaru.

No	Pangkat	Golongan	Jumlah	Persentase
1.	Pembina Tk. I	IV/ b	2	3,44
2.	Pembina	IV/ a	3	5,17
3.	Penata Tk. I	III/ d	8	13,79
4.	Penata	III/ c	9	15,51
5.	Penata Muda Tk. I	III/ b	6	10,34
6.	Penata Muda	III/ a	18	31,03
7.	Pengatur Tk. I	II/ d	7	12,06

8.	Pengatur	II/ c	2	3,44
9.	Pengatur Muda Tk. I	II/ b	1	1,72
10.	Pengatur Muda	II/ a	2	3,44
Jumlah		-	58	100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 2010

4.5. Wilayah dan Gambaran Kota Pekanbaru.

1. Letak dan Luas.

Kota pekanbaru terletak antara 101°14′ - 101°34′ Bujur Timur dan 0°25′ - 0°45′ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan bagian Utara landai bergelombang dengan ketinggian berkisar 5-11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan/ Desa. Dari hasil pengukuran/ pematokan dilapangan oleh BPN Tk I Riau Maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/ Desa baru dengan Perda Tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/ Desa.

2. Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

- Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

3. Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C -

23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

5. Jarak Ibukota

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Propinsi Riau yang mempunyai jarak lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota Propinsi lainnya sebagai berikut :

1. Jarak Kota Pekanbaru ke Taluk Kuantan adalah 118 Km.
2. Jarak Kota Pekanbaru ke Rengat adalah 159 Km.
3. Jarak Kota Pekanbaru ke Tembilahan adalah 213,5 Km.
4. Jarak Kota Pekanbaru ke Kerinci adalah 33,5 Km.
5. Jarak Kota Pekanbaru ke Siak adalah 74,5 Km.
6. Jarak Kota Pekanbaru ke Bangkinanng adalah 51 Km.
7. Jarak Kota Pekanbaru ke Pasir Pangaraian adalah 132,5 Km.
8. Jarak Kota Pekanbaru ke Bengkalis adalah 128 Km.

9. Jarak Kota Pekanbaru ke Bagan adalah 192,5 Km.

10. Jarak Kota Pekanbaru ke Dumai adalah 125 Km.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.I Identitas Responden

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada tujuan penelitian yang intinya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan khususnya pada masyarakat Kota Pekanbaru, maka terlebih dahulu penulis akan membahas tentang responden penelitian. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan masukan bagi pembaca dan memperjelas arah dari pada penelitian ini.

Responden yang ada di dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berdomisili di Kota Pekanbaru dengan jumlah sebanyak 398 jiwa yang terdaftar sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dan telah melakukan tunggakan. Adapun karakteristik dari responden adalah sebagai berikut:

1. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu penunjang demi meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sepanjang sejarah perkembangan dunia yang dinamis ini, faktor pendidikan menjadi hal yang paling utama dan harus

diperhatikan seksama oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal usia. Dalam artian bahwa pendidikan akan terus mengitari siklus kehidupan manusia, bahkan pendidikan senantiasa menempati posisi yang paling atas dalam kriteria pencapaian suatu kualitas dan produktivitas yang baik.

Dapat dikatakan bahwa pendidikan bukan hanya tuntutan bagi pemerintah melainkan juga menjadi keharusan bagi setiap masyarakat sebagai Wajib Pajak, yang dengan pendidikan itu nantinya sedikit banyak masyarakat akan memiliki pemahaman dan pengetahuan tentang pajak itu sendiri dan akhirnya masyarakat secara sadar akan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui lebih jelas tingkat pendidikan masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.I
Tingkat Pendidikan Responden di Kota Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Tidak/belum pernah sekolah	26	6,5
2	Tidak/belum tamat SD	51	12,8
3	Tamat SD/MI/Sederajat	74	18,6
4	Tamat SLTP/ MTS/ sederajat	56	14,1
5	Tamat SMU/SMK/MA/ sederajat	68	17,1
6	Tamat DI/D2/D3	60	15,1
7	Tamat SI	49	12,3
8	Tamat S2/S3	14	3,5
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel V.I di atas dapat dijelaskan sebanyak 398 responden yang berlatar belakang dari perguruan tinggi masih sangat minim yakni tamatan DI/D2/D3 sebanyak 60 jiwa (15,1%), tamatan SI sebanyak 49 jiwa (12,3%), sedangkan tamatan S2 hanya 14 jiwa (3,5%). Jumlah responden yang menamatkan pendidikan paling dominan hanya sampai SD/MI/ sederajat yakni sebanyak 74 jiwa (18,6%).

2. Identitas Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mencari dan memperoleh rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pekerjaan sangat erat kaitannya dengan keadaan sosial ekonomi dan akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui jenis pekerjaan responden dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2
Jenis Pekerjaan Responden di Kota Pekanbaru

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Pertanian	29	7,3
2	Perkebunan	35	8,8
3	Peternakan	29	7,3
4	Perikanan	15	3,8
5	Kehutanan	10	2,5
6	Industri	38	9,5
7	Perdagangan	69	17,4
8	Pegawai Negeri Sipil	43	10,8

9	Tenaga Honorer	67	16,8
10	Jasa-jasa lainnya	63	15,8
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Pada tabel V.2 di atas dapat dilihat bahwa dari 398 orang responden mata pencaharian yang paling dominan adalah perdagangan yakni sebanyak 69 jiwa (17,4%), sedangkan pertanian dan peternakan hanya 29 responden (7,3%), kemudian terdapat sebanyak 35 responden (8,8%) bekerja di bidang perkebunan, sebanyak 15 responden (3,8%) bekerja di bidang perikanan, 10 responden (2,5%) bekerja di bidang kehutanan, di bidang industri sebanyak 38 responden (9,5%), bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 43 responden (10,8%), kemudian sebanyak 67 responden (16,8%) bekerja sebagai tenaga honorer, dan untuk jasa-jasa lainnya sebanyak 63 responden (15,8%).

5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tunggakan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah . Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat serta peranan pemerintah sebagai aparat pelaksana pemungutan pajak, sehingga pembangunan daerah yang diinginkan nantinya akan terus mengalami

peningkatan yang seimbang dengan lajunya pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Seperti yang telah di uraikan pada BAB II bahwa variabel dari pada penelitian ini adalah kesadaran, kemampuan untuk membayar, pelayanan jasa, dan kelalaian. Maka penulis akan menguraikan masing-masing variabel tersebut menurut jawaban responden.

1. Faktor Kesadaran

Kesadaran merupakan hal yang paling mendasar bagi masyarakat yang belum peduli untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Banyak Wajib Pajak yang sudah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) tetapi belum membayarnya, sehingga Wajib Pajak yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban membayar banyak yang melakukan tunggakan. Selanjutnya Wajib Pajak tidak mahu membayar apabila tidak di tagih dan hal inilah yang membuat aparaturnya terkait harus meluangkan waktu untuk memberikan surat teguran ke rumah-rumah warga yang terdaftar sebagai Wajib Pajak agar segera membayar pajak sesuai dengan tarif yang telah ditentukan.

Pada dasarnya pemerintah juga mempunyai peran yang sangat penting di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap menunaikan kewajibannya untuk membayar pajak. Bagi Wajib Pajak yang melakukan tunggakan, harus

segera mungkin diberlakukan sanksi yang diberikan langsung oleh Pemerintah agar tidak melakukan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan faktor utama yang menentukan tingginya pendapatan dari pajak daerah. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan menyebabkan kurangnya pendapatan dari pajak daerah tersebut. Untuk itu diperlukan sekali partisipasi masyarakat untuk membayar pajak tepat pada waktunya.

Di samping itu pendidikan sangat berperan sekali, yaitu dapat menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh oleh Daerah tertentu. Karena minimnya pendidikan dalam masyarakat terutama mengenai pajak atau pentingnya membayar pajak, dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat itu sendiri, sehingga kurangnya kesadaran yang timbul dari masyarakat untuk membayar pajak. Untuk mengetahui apakah masyarakat sudah benar-benar sadar untuk membayar pajak maka penulis akan menguraikan setiap pertanyaan tersebut pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3
Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru
Tentang Arti Penting PBB Bagi Pembangunan

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	55	13,8
2	Setuju	48	12,1
3	Netral	84	21,1
4	Tidak Setuju	112	28,1
5	Sangat Tidak Setuju	99	24,9
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan Tahun, 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya sebanyak 55 orang atau 13,8% responden menjelaskan bahwa masyarakat kota Pekanbaru masih sangat minim sekali yang mengetahui arti penting PBB, sehingga respon yang diberikan sangat baik masih sedikit. Dari 48 orang atau 12,1% responden menanggapi baik tentang arti penting PBB tetapi masih belum bisa dikatakan baik karena jumlah yang menyatakan sangat tidak baik ada sebanyak 99 orang atau 24,9% responden. Sedangkan dari 84 orang atau 21,1% responden merespon dengan netral dalam artian tingkat kesadaran masyarakat yang mengerti akan arti penting PBB masih sama jumlahnya dengan masyarakat yang tidak mengerti akan arti penting PBB. Dan dari 112 orang atau 28,1% responden memberi respon tidak baik akan kesadaran masyarakat kota Pekanbaru untuk membayar PBB. Dari

penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat Kota Pekanbaru masih belum memahami dengan baik arti penting membayar PBB.

Tabel V.4
Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru
Tentang Wajib Membayar Pajak

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	70	17,6
2	Setuju	69	17,3
3	Netral	77	19,3
4	Tidak Setuju	81	20,4
5	Sangat Tidak Setuju	101	25,4
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus di bayar oleh masyarakat bagi pembiayaan pembangunan daerah. Dari 398 orang hanya sebanyak 70 orang atau 17,6% responden yang memiliki tingkat kesadaran yang sangat baik untuk membayar pajak. Dari 69 orang atau 17,3% responden memiliki tingkat kesadaran baik untuk wajib membayar pajak. 77 orang atau 19,3% responden memiliki tingkat kesadaran yang bersifat netral tentang kesadaran masyarakat untuk wajib membayar PBB dalam artian dari 77 orang tersebut ada yang mengetahui wajibnya membayar PBB dan ada yang tidak mengetahuinya. Sedangkan dari 81 orang atau 20,4% responden mempunyai tingkat kesadaran yang tidak baik karena dari jumlah masyarakat tersebut belum menyadari akan wajibnya membayar PBB. Dan dari 101 orang atau 25,4% responden mempunyai

tingkat kesadaran yang sangat tidak baik, dalam artian tingkat kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru dalam hal wajibnya membayar PBB dapat dikatakan belum mempunyai kesadaran yang maksimal. Karena dari hasil penelitian ini jumlah masyarakat yang mempunyai tingkat kesadaran sangat tidak baik masih cukup banyak.

Tabel V.5
Peran Masyarakat Kota Pekanbaru
Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	82	20,6
2	Setuju	81	20,4
3	Netral	69	17,3
4	Tidak Setuju	81	20,4
5	Sangat Tidak Setuju	85	21,3
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari kondisi tabel di atas dengan jumlah responden sebanyak 398 orang dapat di jelaskan bahwa masyarakat yang berperan sangat baik untuk meningkatkan pendapatan daerah berjumlah 82 orang atau 20,6% responden. Dari 81 orang atau 20,4% responden berperan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah. Adapun dari 69 orang atau 17,3% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral, dalam artian dari jumlah tersebut masyarakat hanya sebagian masyarakat yang berperan baik untuk meningkatkan pendapatan daerah dan sebagian masyarakat lagi tidak memberikan peran yang baik untuk meningkatkan

pendapatan daerah. Sedangkan dari 81 orang atau 20,4% responden menyatakan bahwa mereka belum berperan baik dalam meningkatkan pendapatan daerah. Dan dari 85 orang atau 21,3% responden dapat dikatakan sangat belum pernah berperan aktif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah masyarakat kota pekanbaru yang paling dominan bahwa masyarakat tersebut masih banyak yang belum bisa memberikan kontribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel V.6
Tingkat Penyuluhan PBB yang Dilakukan UPTD DISPENDA Bagi
Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	56	14,1
2	Setuju	40	10
3	Netral	118	29,6
4	Tidak Setuju	91	22,9
5	Sangat Tidak Setuju	93	23,4
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 398 orang responden sebanyak 56 orang atau 14,1% responden merespon sangat baik tentang penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dari 40 orang atau 10% responden menanggapi baik tentang penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Kota Pekanbaru. Tetapi dari 93 orang atau 23,4% responden merespon sangat tidak baik, karena mereka

mengatakan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD akan pentingnya pembayaran PBB belum diterima oleh masyarakat. Sedangkan dari 91 orang atau 22,9% responden memberikan tanggapan tidak baik tentang penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan dari 118 orang atau 29,6% responden memberikan tanggapan dengan asumsi sebagian baik dan sebagian tidak baik tentang penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang penyuluhan yang diberikan oleh pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, walaupun pada dasarnya pihak UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sudah berusaha untuk memberikan penyuluhan baik dalam bentuk baliho, melalui media masa, dan lainnya.

Tabel V.7
Tingkat Sanksi Oleh Direktorat Jenderal PBB Bagi
Masyarakat Kota Pekanbaru yang Melakukan Tunggakan

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	64	16,1
2	Setuju	59	14,8
3	Netral	70	17,6
4	Tidak Setuju	84	21,1
5	Sangat Tidak Setuju	121	30,4

Jumlah	398	100
---------------	------------	------------

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari 398 orang responden berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat sanksi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal PBB bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan tunggakan sebanyak 121 orang atau 30,4% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik karena sanksi yang diberikan tidak memberatkan masyarakat. Dari 84 orang atau 21,1% responden memberikan tanggapan tidak baik. Sekitar 70 orang atau 17,6% responden memberikan tanggapan bahwa dari 70 orang tersebut ada yang merespon baik dan ada pula yang tidak. Sedangkan dari 64 orang atau 16,1% responden merespon sangat baik tentang sanksi yang di buat oleh Direktorat Jenderal PBB dan dari 59 orang atau 14,8% responden memberikan tanggapan sangat setuju terhadap sanksi yang sudah dibuat oleh Direktorat Jenderal PBB. Tapi dari hasil penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa sanksi yang di buat oleh Direktorat Jenderal PBB belum berjalan dengan baik karena terbukti di lapangan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan tunggakan.

Tabel V.8
Rekapitulasi Tingkat Kesadaran Masyarakat Kota Pekanbaru
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Indikator Pernyataan	Kategori					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tingkat kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru tentang arti penting PBB bagi pembangunan.	55	48	84	112	99	398
2	Tingkat kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru tentang wajib membayar pajak.	70	69	77	81	101	398
3	Peran masyarakat Kota Pekanbaru untuk meningkatkan pendapatan Daerah.	82	81	69	81	85	398
4	Tingkat penyuluhan PBB yang dilakukan UPTD DISPENDA bagi masyarakat Kota Pekanbaru.	56	40	118	91	93	398
5	Tingkat sanksi oleh Direktorat Jenderal PBB bagi masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan tunggakan.	64	59	70	84	121	398
Rata-rata		65 (16,4)	59 (15)	84 (21)	90 (22,6)	100 (25)	398 (100)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari hasil rekapitulasi penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Walaupun dari pihak Pemerintah sudah memberikan berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal tersebut terbukti dari sebanyak 398 orang responden hanya sekitar 65 orang atau 16,4% responden yang sadar akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan khususnya masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru. Dari 59 orang atau 15% responden menyatakan bahwa mereka masih belum mengerti akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga tingkat kesadaran masyarakat tersebut dapat dikatakan baik. Sebanyak 90 orang atau 21% responden memberikan respon yang bersifat netral akan kesadaran untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Setelah itu dari 84 orang atau 22,6% responden memberikan tanggapan bahwasanya mereka ada yang menyadari akan pentingnya membayar PBB dan ada pula yang tidak menyadarinya. Sedangkan dari 100 orang atau 25% responden diketahui memiliki tingkat kesadaran yang sangat tidak baik. Maka dari itu, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru masih sangat tidak baik. Ini terbukti dari hasil penelitian bahwa masih banyak jumlah masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membayar PBB dibandingkan dengan masyarakat yang menyadarinya.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa hal yang sebenarnya paling mendasar adalah tingkat kesadaran masyarakat itu sendiri. Seperti apa yang telah dikatakan oleh **Hj. Netty Ennita, S.H** dan beliau adalah Kepala Seksi Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru menjelaskan bahwasanya di dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Pekanbaru tersebut sebenarnya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan seperti, pemasangan baliho di tempat-tempat umum, pengumuman melalui media massa, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa sampai sekarang ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah tersebut belumlah membawa hasil yang maksimal bagi masyarakat, karena terbukti sampai saat sekarang ini banyak masyarakat yang belum paham akan pentingnya PBB bagi pembangunan dan masih banyak yang melakukan tunggakan.

2. Kemampuan untuk Membayar (Ability to Pay)

Pendapatan atau kekayaan Wajib Pajak, sebagai mana kita tahu bahwa kehidupan rakyat Indonesia adalah mayoritas menengah ke bawah. Dan disertai tarif pajak yang relatif tinggi sehingga banyak Wajib Pajak menunggak dalam

membayar kewajibannya tersebut. Wajib Pajak yang tidak mampu membayar tidak mengajukan pengurangan dan apabila data yang di dapat salah, Wajib Pajak juga tidak mengajukan keberatan serta kadang kala ada Wajib Pajak yang tidak membayar karena mempunyai objek pajak yang harus di bayar lebih dari satu.

Dari hasil penelitian penulis dengan beberapa Wajib Pajak yang melakukan tunggakan, mereka menjelaskan bahwa ada sebagian dari mereka yang kurang mampu untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini disebabkan oleh tarif pajak yang ditetapkan sangat tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan pendapatan Wajib Pajak. Karena mayoritas Wajib Pajak yang melakukan tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah warga yang berpenghasilan menengah ke bawah.

Tarif pajak merupakan suatu ukuran atau standar dari suatu pemungutan pajak yang dapat mempergunakan perhitungan proporsi (persentase) atau bersifat tetap. Pajak yang dipungut haruslah berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kata lain bahwasanya tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak haruslah sesuai dengan ukuran objek pajak itu sendiri. Untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.9
Tingkat Kemampuan untuk Membayar Masyarakat Kota Pekanbaru
Dilihat Dari Tarif Pajak yang Dikenakan

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	54	13,6
2	Setuju	84	21,1
3	Netral	77	19,3
4	Tidak Setuju	82	20,6
5	Sangat Tidak Setuju	101	25,4
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat penulis jelaskan bahwa sebanyak 398 orang responden menyatakan bahwa tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan tarif pajak masih sangat sedikit sekali, terbukti dengan adanya penelitian sebanyak 101 orang atau 25,4% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik. Dari 82 orang atau 20,6% responden memberikan tanggapan dalam kategori tidak baik. Demikian pula dari 77 orang atau 19,3% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 84 orang atau 21,1% responden memberikan tanggapan yang baik dan dari 54 orang atau 13,6% responden memberikan tanggapan yang sangat baik.

Dari jumlah responden yang memberikan tanggapan sangat baik lebih sedikit dari responden yang memberikan tanggapan sangat tidak baik, maka dapat disimpulkan untuk tingkat kemampuan membayar masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan tarif pajak belum bisa dikatakan sesuai dengan kemampuan masyarakat untuk membayar.

Tabel V.10
Tingkat Kemampuan untuk Membayar Masyarakat Kota Pekanbaru yang
Ditetapkan Oleh Direktorat Jendral PBB

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	87	21,8
2	Setuju	121	30,4
3	Netral	66	16,6
4	Tidak Setuju	67	16,8
5	Sangat Tidak Setuju	57	14,3
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa sebanyak 398 orang responden dan sesuai dengan hasil penelitian dapat dijelaskan sebanyak 57 orang atau 14,3% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik pada tingkat kemampuan masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan. Dari 67 orang atau 16,8% responden memberikan tanggapan tidak baik. Sedangkan dari 66 orang atau 16,6% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Dari 121 orang atau 30,4% responden memberikan tanggapan baik, dalam artian masyarakat Kota

Pekanbaru sudah mulai setuju dengan tarif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan dari 87 orang atau 21,8% responden memberikan tanggapan sangat baik.

Tabel V.11
Tingkat Kemampuan untuk Membayar Masyarakat Kota Pekanbaru
Sesuai dengan Jumlah Pembayaran yang Sudah Ditetapkan

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	71	17,8
2	Setuju	59	14,8
3	Netral	63	15,8
4	Tidak Setuju	64	16,1
5	Sangat Tidak Setuju	141	35,4
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang responden sebanyak 141 orang atau 35,4% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik atas tingkat kemampuan untuk membayar PBB pada masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan jumlah pembayaran yang sudah ditetapkan. Dari 64 orang atau 16,1% responden memberikan tanggapan tidak baik terhadap tingkat kemampuan untuk membayar PBB pada masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan jumlah pembayaran yang telah ditetapkan. Sebanyak 63 orang atau 15,8% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 59 orang atau 14,8% responden memberikan tanggapan baik, dan dari 71 orang atau 17,8% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat kemampuan untuk

membayar PBB pada masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan jumlah pembayaran yang sudah ditetapkan.

Tabel V.12
Tingkat Kemampuan untuk Membayar Masyarakat Kota Pekanbaru
Selama 5 Tahun Terakhir (2005-2009)

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	49	12,3
2	Setuju	42	10,5
3	Netral	91	22,9
4	Tidak Setuju	118	29,6
5	Sangat Tidak Setuju	98	24,6
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang responden berdasarkan hasil penelitian masyarakat yang memberikan respon sangat baik tentang tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir (2005-2009) berjumlah 49 orang atau 12,3% responden. Sebanyak 42 orang atau 10,5% responden memberikan tanggapan baik. Dari 91 orang atau 22,9% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 118 orang atau 29,6% responden memberikan tanggapan yang bersifat tidak setuju. Dan dari 98 orang atau 24,6% responden memberikan tanggapan yang bersifat sangat tidak setuju.

Tabel V.13
Tingkat Kemampuan untuk Membayar Masyarakat Kota Pekanbaru
Atas Pembayaran Pajak yang Selalu Berubah

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	43	10,8
2	Setuju	82	20,6
3	Netral	66	16,6
4	Tidak Setuju	131	32,9
5	Sangat Tidak Setuju	76	19,1
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang responden sebanyak 43 orang atau 10,8% responden memberikan tanggapan sangat baik tentang tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru atas pembayaran pajak yang selalu berubah. Dari 82 orang atau 20,6% responden memberikan tanggapan baik. Sedangkan sebanyak 66 orang atau 16,6% responden memberikan tanggapan yang berbentuk netral. Sebanyak 131 orang atau 32,9% responden memberikan tanggapan tidak baik. Dan dari 76 orang atau 19,1% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik atas tingkat kemampuan

untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru atas pembayaran pajak yang selalu berubah.

Tabel V.14
Rekapitulasi Tingkat Kemampuan untuk Membayar
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Indikator Pernyataan	Kategori					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru dilihat dari tarif pajak yang dikenakan.	54	84	77	82	101	398
2	Tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral PBB.	87	121	66	67	57	398
3	Tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru sesuai dengan jumlah pembayaran yang sudah ditetapkan.	71	59	63	64	141	398

4	Tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru selama 5 tahun terakhir (2005-2009)	49	42	91	118	98	398
5	Tingkat kemampuan untuk membayar masyarakat Kota Pekanbaru atas pembayaran pajak yang selalu berubah	43	82	66	131	76	398
Rata-rata		61 (15,3)	78 (19,5)	73 (18,4)	92 (23)	94 (23,8)	398 (100)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 398 responden hanya sebanyak 61 orang atau 15,3% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat kemampuan untuk membayar PBB pada masyarakat Kota Pekanbaru sebanyak 78 orang atau 19,5% responden memberikan tanggapan baik. Dari 73 orang atau 18,4% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 92 orang atau 23% responden memberikan tanggapan tidak baik dan dari 94 orang atau 23,8% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tarif yang tidak sesuai dengan ukuran objek pajak akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga nantinya akan mengakibatkan masyarakat melakukan tunggakan pembayaran bahkan sampai tidak mau membayar. Seperti yang telah dijelaskan oleh masyarakat yang menjadi responden dalam penelitian ini dan salah satunya adalah **Ibu Khairat** yang berasal dari Kelurahan Sri Meranti dan beliau pernah melakukan tunggakan menjelaskan bahwa dengan terjadinya hal tersebut Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat akan besar atau tidaknya tarif pajak yang harus di bayar sesuai dengan objek pajak tersebut. Sehingga besar kemungkinan tunggakan yang banyak dilakukan oleh masyarakat tidak akan terjadi. Sedangkan berdasarkan penjelasan salah satu staf Bagi Hasil Pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yaitu **Bapak Andy Tega Winata** menjelaskan bahwa sebenarnya masyarakat yang lebih banyak melakukan tunggakan adalah masyarakat yang berasal dari ekonomi kelas ke bawah. Masyarakat tersebut sebenarnya sudah terdaftar di dalam SPPT tetapi masih melakukan tunggakan dan jumlah tarif yang harus dibayar juga tidak terlalu besar dalam setiap tahunnya dan sudah sesuai dengan objek pajak, tetapi menurut beliau masyarakat merasa keberatan karena selama ini sudah melakukan tunggakan lebih dari 3 kali. Sehingga tarif yang dikeluarkan apabila Pemerintah melakukan teguran untuk membayar PBB terasa berat bagi masyarakat.

3. Pelayanan Jasa (Public Service)

Kurangnya pelayanan jasa pemerintah daerah kepada Wajib Pajak yaitu masyarakat Kecamatan khususnya, otomatis akan membuat masyarakat berkurang kesadarannya untuk memberikan kontraprestasi kepada daerah dalam bentuk pembayaran pajak. Ini juga diakibatkan oleh:

- a. Kurang Diterapkannya Peraturan Pengenaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

Masih banyaknya penetapan objek pajak yang seharusnya sudah dikenakan pajak, karena kurang dijalankannya peraturan pengenaan objek yang kena pajak, maka kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan sekali untuk memberitahukan kepada semua masyarakat luas tentang objek yang sudah wajib kena pajak dan objek yang belum wajib dikenakan pajak.

- b. Kurangnya Staf dan Pegawai serta Aparatur terkait dalam Melakukan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah dibutuhkan staf dan pegawai serta aparatur terkait yang benar-benar mau berpartisipasi melakukan pemungutan pajak khususnya di dalam meningkatkan pajak daerah. Dalam hal ini lebih ditekankan dengan mengevaluasi SPPT yang tidak tersampaikan kepada masyarakat yaitu mengenai kendala yang nantinya akan diklarifikasikan ke kantor

Pajak. Pemerintah juga telah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak pada tempat pembayaran yang telah di sediakan oleh setiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah masyarakat di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk mengetahui apakah instansi yang melakukan pemungutan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sudah melakukan pelayanan yang baik, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.15
Tingkat Pelayanan Jasa Petugas Pemerintah
Ketika Melakukan Pembayaran PBB

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	57	14,3
2	Setuju	64	16,1
3	Netral	59	14,8
4	Tidak Setuju	142	35,7
5	Sangat Tidak Setuju	76	19,1
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya 57 orang atau 14,3% responden memberikan tanggapan sangat baik kepada tingkat pelayanan jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Dari 64 orang atau 16,1% responden memberikan tanggapan baik terhadap tingkat pelayanan yang telah diberikan masyarakat. Kemudian dari 59 orang atau 14,8% responden ada yang memberikan tanggapan baik dan ada yang tidak, dalam artian masyarakat Kota Pekanbaru masih memberikan respon yang bersifat netral kepada

Pemerintah. Sedangkan dari 142 orang atau 35,7% responden memberikan respon tidak baik atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah ketika melayani masyarakat membayar PBB. Dan dari 76 orang atau 19,1% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pelayanan jasa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat belum bisa berjalan dengan baik. Terbukti dari hasil penelitian, masyarakat yang memberikan tanggapan tidak baik lebih banyak dari pada yang baik.

Tabel V.16
Tingkat Pelayanan Jasa Petugas Pemerintah Ketika Menyampaikan
SPPT atau SKP kepada Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	48	12,1
2	Setuju	88	22,1
3	Netral	89	22,4
4	Tidak Setuju	101	25,4
5	Sangat Tidak Setuju	72	18,1
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dari 398 orang hanya 48 orang atau 12,1% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan SPPT atau SKP kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sebanyak 88 orang atau 22,1% responden memberikan tanggapan baik. Sebanyak 89 orang atau

22,4% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 101 orang atau 25,4% responden memberikan tanggapan tidak baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan SPPT atau SKP kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan dari 72 orang atau 18,1% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Tabel V.17
Tingkat Pelayanan Jasa Petugas Pemerintah Berdasarkan
Tanggapan Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	94	23,6
2	Setuju	81	20,4
3	Netral	30	7,5
4	Tidak Setuju	99	24,9
5	Sangat Tidak Setuju	94	23,6
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian bahwasanya dari 398 orang hanya 94 orang atau 23,6% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Sebanyak 81 orang atau 20,4% responden memberikan tanggapan baik. Sebanyak 30 orang atau 7,5% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 99 orang atau 24,9% responden memberikan tanggapan tidak baik terhadap tingkat pelayanan jasa yang

diberikan petugas pemerintah kepada masyarakat Kota Pekanbaru dan dari 94 orang atau 23,6% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Tabel V.18
Tingkat Pelayanan Jasa Petugas Pemerintah Ketika Menyampaikan SPOP
dalam Rangka Pendataan Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	83	20,8
2	Setuju	49	12,4
3	Netral	72	18,1
4	Tidak Setuju	83	20,8
5	Sangat Tidak Setuju	111	27,9
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan berdasarkan hasil penelitian bahwa dari 398 responden yang memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan SPOP dalam rangka pendataan kepada masyarakat Kota Pekanbaru adalah sebanyak 83 orang atau 20,8% responden. Sebanyak 49 orang atau 12,4% responden memberikan tanggapan baik. Sebanyak 72 orang atau 18,1% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 83 orang atau 20,8% responden memberikan tanggapan tidak baik. Dan dari 111 orang atau 27,9% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Tabel V.19
Tingkat Pelayanan Jasa Petugas Pemerintah Ketika Menyampaikan STP
kepada Masyarakat Kota Pekanbaru yang Melakukan Tunggakan.

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	87	21,8
2	Setuju	80	20,1
3	Netral	59	14,8
4	Tidak Setuju	40	10,1
5	Sangat Tidak Setuju	132	33,2
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dan berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa sebanyak 398 orang hanya 87 orang atau 21,8% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan STP kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan tunggakan. Sebanyak 80 orang atau 20,1% responden memberikan tanggapan baik. Sebanyak 59 orang atau 14,8% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 40 orang atau 10,1% responden memberikan tanggapan tidak baik terhadap tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan STP kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan

tunggakan. Dan dari 132 orang atau 33,2% memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Tabel V.20
Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pelayanan Jasa
Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Indikator Pernyataan	Kategori					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika melakukan pembayaran PBB.	57	64	59	142	76	398
2	Tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan SPPT atau SKP kepada masyarakat Kota Pekanbaru.	48	88	89	101	72	398
3	Tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah berdasarkan tanggapan masyarakat Kota Pekanbaru.	94	81	30	99	94	398
4	Tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan SPOP dalam rangka pendataan kepada	83	49	72	83	111	398

	masyarakat Kota Pekanbaru.						
5	Tingkat pelayanan jasa petugas pemerintah ketika menyampaikan STP kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang melakukan tunggakan.	87	80	59	40	132	398
Rata-rata		74 (18,5)	72 (18,2)	62 (15,5)	93 (23,4)	97 (24,4)	398 (100)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian penulis sebanyak 398 orang hanya 74 orang atau 18,5% responden memberikan tanggapan sangat baik terhadap pelayanan jasa yang diberikan pemerintah khusus dalam pembayaran PBB. Sedangkan dari 72 orang hanya 18,2% responden memberikan tanggapan baik. Sebanyak 62 orang atau 15,5% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 93 orang atau 23,4% responden memberikan tanggapan tidak baik. Dan dari 97 orang atau 24,4% responden memberikan tanggapan sangat tidak baik.

Dari penjelasan di atas dapat penulis paparkan berdasarkan hasil penelitian bahwa dari hasil penjelasan masyarakat yang melakukan tunggakan PBB, pelayanan jasa yang di berikan oleh Pihak Dinas Pendapatan Daerah dan pihak Kecamatan atau Kelurahan setempat di mana masyarakat harus membayar pajak

belum bisa dikatakan baik karena masih terdapat sistem pelayanan yang kurang efektif sehingga timbul rasa ketidaksenangan masyarakat di dalam membayar PBB dan akhirnya masyarakat lebih memilih untuk melakukan tunggakan. Karena pada dasarnya masyarakat sebagai salah satu penunjang pendapatan daerah dan sudah pasti masyarakat hanya membutuhkan sistem pelayanan yang cepat dan efisien. Sedangkan menurut **Bapak Andy Tega Winata** sebagai salah satu staf Bidang Bagi Hasil mengatakan bahwa dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru hanya sebagai fasilitator antara kantor Pelayanan Pajak yang membidangi masalah PBB dengan pihak Kecamatan atau Kelurahan sebagai ujung tombak Pemerintah Daerah. Mengenai hal pelayanan jasa yang diberikan pemerintah menurut beliau sudah sangat efisien karena pada saat sekarang ini masyarakat diberi kemudahan untuk membayar PBB ke tempat terdekat yaitu ke Kelurahan masing-masing, dan juga bisa langsung membayar ke Bank Daerah yaitu melalui rekening Bank Riau. Dalam hal ini masyarakat tidak perlu melakukan pembayaran ke DISPENDA Kota Pekanbaru karena dalam hal ini Pemerintah Daerah hanya bertindak sebagai mitra kerja dari kantor Pelayanan Pajak yang menangani PBB tersebut, sebab PBB ini adalah pajak Pemerintah Pusat yang mana daerah hanya dapat pembagian hasilnya saja.

d. Kelalaian

Bagi Wajib Pajak yang sulit meluangkan waktunya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena lamanya proses dan prosedur pembayaran pajak, kelalaian juga sering terjadi bagi Wajib Pajak yang sudah menerima SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang), tetapi belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini disebabkan juga oleh banyaknya masyarakat yang tidak tahu dan kurang peduli dengan sistem dan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena kurangnya informasi yang didapati masyarakat dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru atau dari Instansi terkait. Untuk itu diharapkan kepada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk mengadakan penyuluhan atau memberikan keterangan yang sangat jelas tentang bagaimana sistem dan prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang tepat demi kemajuan pembangunan daerah, agar tidak terjadi kelalaian bagi Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan meningkatkan penerapan sanksi terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang berlaku. Mengadakan sanksi atau denda atas keterlambatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini bertujuan agar Wajib Pajak dapat segera melunasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, karena jika ditunda-tunda pembayarannya akan menjadi lebih banyak disebabkan dengan denda sebanyak 2 % per bulan. Untuk mengetahui tingkat kelalaian masyarakat maka penulis akan menjelaskannya pada tabel berikut ini:

Tabel V.21
Tingkat kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru
Berdasarkan Waktu Pembayaran

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	55	13,8
2	Setuju	86	21,6
3	Netral	60	15,1
4	Tidak Setuju	141	35,4
5	Sangat Tidak Setuju	56	14,1
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya 55 orang atau 13,8% responden memberikan tanggapan sangat tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan waktu pembayaran yang telah ditentukan. Sebanyak 86 orang atau 21,6% responden memberikan tanggapan tinggi. Dari 60 orang atau 15,1% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 141 orang atau 35,4% responden memberikan tanggapan tidak tinggi. Dan dari 56 orang atau 14,1% responden memberikan tanggapan

sangat tidak tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan waktu pembayarannya.

Tabel V.22
Tingkat Kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru Sehingga
Terlambat untuk Membayar PBB

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	74	18,6
2	Setuju	59	14,8
3	Netral	75	18,9
4	Tidak Setuju	34	8,5
5	Sangat Tidak Setuju	156	39,2
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya 74 orang atau 18,6% responden memberikan tanggapan sangat tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru sehingga terlambat untuk membayar PBB. Sebanyak 59 orang atau 14,8% responden memberikan tanggapan tinggi. Sebanyak 75 orang atau 18,9% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan sebanyak 34 orang atau 8,5% responden memberikan tanggapan tidak tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru

sehingga terlambat untuk membaayr PBB. Dan dari 156 orang atau 39,2% responden memberikan tanggapan sangat tidak tinggi.

Tabel V.23
Tingkat Kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru yang
Pernah Melakukan Tunggakan PBB

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	91	22,8
2	Setuju	44	11,4
3	Netral	72	18
4	Tidak Setuju	94	23,5
5	Sangat Tidak Setuju	97	24,3
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya 91 orang atau 22,8% responden menyatakan bahwa jumlah tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan PBB sangat sedikit. Sebanyak 44 orang atau 11,4% responden menyatakan bahwa jumlah tingkat kelalaian masyarakat sedikit. Sebanyak 72 orang atau 18% responden menyatakan ragu-ragu atas tingkat kelalaian masyarakat yang pernah melakukan tunggakan PBB. Sedangkan dari 94 orang atau 23,5% responden menyatakan tanggapan tidak

sedikit akan tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan, dan dari 97 orang atau 24,3% responden memberikan tanggapan sangat tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan PBB.

Tabel V.24
Tingkat Kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru yang
Pernah Melakukan Tunggakan Kurang dari 3 Kali

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	30	7,5
2	Setuju	93	23,4
3	Netral	97	24,4
4	Tidak Setuju	84	21,1
5	Sangat Tidak Setuju	94	23,6
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya sebanyak 30 orang atau 7,5% responden memberikan tanggapan sangat sedikit terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan kurang dari tiga kali. Sebanyak 93 orang atau 23,4% responden memberikan tanggapan sedikit. Sebanyak 97 orang atau 24,4% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 84 orang atau 21,1% responden

memberikan tanggapan tidak sedikit. Dan dari 94 orang atau 23,6% responden memberikan tanggapan sangat tidak sedikit terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan kurang dari 3 kali dalam artian tingkat kelalaian masyarakat masih sangat banyak.

Tabel V.25
Tingkat Kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru yang
Pernah Melakukan Tunggakan Lebih dari 3 Kali

No	Kategori	Jumlah Responden (Orang)	Persentase (%)
1	Sangat Setuju	39	9,8
2	Setuju	40	10,1
3	Netral	98	24,6
4	Tidak Setuju	88	22,1
5	Sangat Tidak Setuju	133	33,4
Jumlah		398	100

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa dari 398 orang hanya sebanyak 39 orang atau 9,8% responden memberikan tanggapan sangat tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan lebih dari tiga kali. Sebanyak 40 orang atau 10,1% responden memberikan tanggapan sedikit. Sebanyak 98 orang atau 24,6% responden memberikan tanggapan yang bersifat netral. Sedangkan dari 88 orang atau 22,1% responden

memberikan tanggapan tidak sedikit. Dan dari 133 orang atau 33,4% responden memberikan tanggapan sangat tidak tinggi terhadap tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan lebih dari 3 kali dalam artian tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru masih sangat banyak.

Tabel V. 26
Rekapitulasi Tingkat Kelalaian Masyarakat Kota Pekanbaru di dalam
Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

No	Indikator Pernyataan	Kategori					Total
		SS	S	N	TS	STS	
1	Tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru berdasarkan waktu pembayaran.	55	86	60	141	56	398
2	Tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru sehingga terlambat untuk membayar PBB.	74	59	75	34	156	398
3	Tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan PBB.	91	44	72	94	97	398
4	Tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan	30	93	97	84	94	398

	kurang dari 3 kali.						
5	Tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru yang pernah melakukan tunggakan lebih dari 3 kali.	39	40	98	88	133	398
Rata-rata		58 (14,5)	64 (16,2)	81 (20,2)	88 (22,2)	107 (26,9)	398 (100)

Sumber: Hasil Penelitian Lapangan, Tahun 2010

Berdasarkan dari tabel rekapitulasi di atas, dari 398 orang dapat dijelaskan bahwa sebanyak 58 orang atau 14,5% responden menyatakan bahwa tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru di dalam membayar PBB sangat sedikit. Sebanyak 64 orang atau 16,2% responden menyatakan bahwa tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru sedikit. Dari 81 orang atau 20,2% responden menyatakan ragu-ragu akan tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru di dalam membayar PBB. Sebanyak 88 orang atau 22,2% responden menyatakan bahwa tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru tidak sedikit. Sedangkan dari 107 orang atau 26,9% responden menyatakan bahwa tingkat kelalaian masyarakat Kota Pekanbaru sangat tidak sedikit dalam artian masih sangat banyak masyarakat yang lalai di dalam membayar PBB.

Berdasarkan hasil penjelasan di atas dapat dikatakan bahwasanya tingkat kelalaian masyarakat sangat tinggi karena terbukti masih banyak masyarakat yang tidak memahami pentingnya PBB bagi pembangunan daerah sehingga sampai saat sekarang ini masih banyak masyarakat yang melakukan tunggakan pembayaran

PBB. Sanksi yang diberikan oleh Pemerintah seakan-akan tidak menjadi beban bagi masyarakat karena masyarakat masih banyak yang enggan membayar PBB. Menurut **Ibu Leni Marlina, S.IP** dan beliau adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD menjelaskan bahwasanya bagi masyarakat yang paham akan PBB pasti tidak akan lalai untuk membayar. Maka dari itu dalam hal Pemerintah harus mempunyai peran yang cukup besar dan sudah melakukan berbagai upaya agar masyarakat tidak melakukan tunggakan. Salah satunya adalah sanksi yang telah di buat oleh Direktorat Jenderal yaitu sanksi dengan denda 2% per bulan yang harus benar-benar di jalankan agar masyarakat tidak melakukan tunggakan lagi.

5.3 Usaha- Usaha yang Dilakukan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru.

Sehubungan dengan kendala-kendala yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga menyebabkan banyak terjadinya tunggakan, maka UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mengupayakan beberapa hal antara lain:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dimana

penyuluhan ini dilakukan dengan bekerja sama kepada setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru.

2. Memasang spanduk dan brosur yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di setiap kecamatan dan pada tempat-tempat umum lainnya yang sifatnya strategis dan mudah diperlihatkan kepada masyarakat.
3. Membuat papan nama proyek yang di dalamnya bertuliskan bahwa setiap pembangunan daerah tersebut berasal dari dana masyarakat yang telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan rutin dan tepat waktu.
4. Setiap berurusan dengan pemerintah setempat, maka orang yang bersangkutan harus membawa bukti bahwa mereka telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5.4 Kebijakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

1. Mengadakan undian berhadiah bagi Wajib Pajak yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mana pengundiannya dilakukan setiap akhir tahun, tepatnya satu kali setahun.

2. Memberikan sanksi dengan menyerahkan surat edaran tentang denda sebanyak 2% bagi masyarakat yang melakukan tunggakan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Adapun kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tunggakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dari faktor kesadaran, yaitu seberapa besar masyarakat mengetahui tentang arti dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kesadaran diperoleh melalui penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan pemasangan sepanduk dan brosur. Dari faktor ini sebenarnya sudah terlaksana secara intensif, hanya saja masyarakat kurang menyadari arti penting dan manfaat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) itu sendiri. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa sebanyak 100 orang atau 25% responden belum mengetahui arti dan manfaat pajak sehingga kurangnya kesadaran mereka untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Selain itu, ada

sebagian masyarakat yang tahu mengenai Pajak Bumi dan Bangunan akan tetapi mereka kurang memiliki kesadaran untuk membayar pajak.

2. Dari faktor kemampuan untuk membayar dalam artian mengenai tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak ternyata belum sesuai dengan ukurannya. Hal ini terbukti dengan tanggapan 94 orang atau 23,8% responden menyatakan bahwa tarif pajak yang mereka bayar belum sesuai dengan ukurannya sehingga kemampuan mereka untuk membayar pajak tersebut belum dapat terpenuhi.
3. Dari faktor pelayanan jasa dalam artian menyangkut kepuasan seseorang di dalam melakukan transaksi pembayaran khususnya masyarakat yang minta dilayani dengan baik dalam hal ini pemerintah sudah berusaha dengan baik tetapi dari hasil penelitian terbukti dengan tanggapan sebanyak 97 orang atau 24,4% responden menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait belum berjalan dengan baik, karena masih banyak masyarakat yang harus menunggu proses pembayaran yang agak berbelit-belit, walaupun pada dasarnya pembayaran PBB sudah dilimpahkan ke Kecamatan atau Kelurahan terdekat. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat tidak mau untuk membayar pajak.

4. Dari faktor Kelalaian yaitu menyangkut tentang sistem dan prosedur di dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sehingga apabila masyarakat tahu tentang sistem dan prosedur tersebut maka masyarakat akan membayar pajak tepat pada waktunya dan tidak melakukan tunggakan akibat kelalaian. Banyaknya tunggakan yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya juga terdapat pada faktor kelalaian. Hal ini dapat kita lihat dalam hasil penelitian responden sebanyak 107 orang atau 26,9% responden melakukan tunggakan pembayaran Pajak lebih dari tiga kali sejak tahun 2005-2009, dan hal ini juga dikarenakan oleh faktor kelalaian.

Dari beberapa faktor yang telah disebutkan di atas pada dasarnya Pemerintah sudah melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat tentang arti pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Memasang spanduk dan brosur yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Membuat papan nama proyek.

4. Memberikan tekanan kepada masyarakat untuk membawa bukti telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan setiap kali membayar.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga membuat berbagai macam kebijakan kepada masyarakat agar mahu membayar pajak dalam meningkatkan Pendapatan Daerah, diantaranya adalah dengan mengadakan undian berhadiah bagi wajib pajak yang telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan tunggakan dengan denda sebesar 2%.

a. Saran

Dari kesimpulan di atas maka penulis akan memberikan saran yang di anggap relevan dan kiranya bisa membantu terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah perlu mengadakan penyuluhan secara periodik untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat agar sadar tentang arti dan manfaat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena kesadaran dan peran serta masyarakat tidak hanya dituntut dengan menunaikan kewajiban untuk membayar pajak saja, melainkan juga adanya tanggung jawab dari kedua belah pihak baik itu dari aparat pemungut pajak maupun Wajib Pajak itu sendiri sehingga tidak akan ada

lagi hambatan-hambatan yang dialami dan masyarakat lebih berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pemerintah harus memberikan pelayanan yang prima kepada setiap masyarakat yang mahu membayar pajak, mulai dari penjelasan prosedur pembayaran pajak, serta tarif pajak yang dikenakan agar keinginan untuk membayar dari masyarakat dapat tumbuh dan berjalan dengan baik.
3. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat agar mau membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan tidak terjadi tunggakan, maka pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru perlu mempertegas hukum dan sanksi bagi masyarakat yang melakukan tunggakan pembayaran pajak, sesuai dengan hukum dan sanksi yang telah di buat oleh Direktorat Jenderal Perpajakan agar masyarakat tidak lalai dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- Alex. *Kamus Ilmiah Populer Kontemporer*. Karya Harapan, Surabaya: 2005.
- Bohari, *Pengantar Perpajakan*. PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006.
- _____, *Pengantar Hukum Pajak*. PT. Raja Grafindo, Jakarta. 2006.
- Brotodiharjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Rafika Aditama, Bandung. 2000.
- Ismawan, Indra. *Memahami Reformasi Perpajakan*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta: 2001
- Judiseno, Rimsy. K. *Perpajakan*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta: 2003.
- Markus, Muda. *Perpajakan Indonesia suatu Pengantar*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2005.
- Pandiangan, Liberty. *Undang-undang Perpajakan*. Erlangga, Jakarta, 2002.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.
- Purnawan, Herman. *Undang-undang Perpajakan*. Erlangga, Jakarta, 2000.
- Setiawan, Agus, *Perpajakan Umum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta: 2005
- Sihaan, P. Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2005.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung. 2006.
- Surahmat, Rachmanto, *Pajak Berganda*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Tjahjono, Achmad dan Triyono Wahyudi. *Perpajakan Indonesia Pendekatan Soal Jawab dan Kasus*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.
- Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta, 2007.
- Wirawan, Waluyo, *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta. 2003.
- www. Yahoo.com: Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- (<http://Inweb18.worldbank.org/Tunggakan> Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)).

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.
- Lampiran 2 Target dan Realisasi serta Sisa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Kota Pekanbaru dari Tahun 2005 sampai 2009.
- Lampiran 3 Surat Keterangan Dosen Pembimbing.
- Lampiran 4 Surat Keterangan Izin Riset.
- Lampiran 5 Surat Rekomendasi dari Badan Informasi, Komunikasi, dan Kesatuan
Bangsa Provinsi Riau.
- Lampiran 6 Surat Keterangan Telah Melakukan Riset dari Unit Pelaksana Tekhnis
Dinas (UPTD) Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.



Suhaeni dilahirkan pada hari senin di sebuah desa yakni desa Kubu daerah Bagan Siapi-api, Rokan Hilir tepatnya pada tanggal 13 Februari 1989. Beliau adalah anak sulung dari tiga bersaudara. Ayahnya bernama Solihin Soma dan Ibunya bernama Nurhasanah.

Penulis sebelumnya pernah mengecap pendidikan di SDN 002 Singkep dan tamat pada tahun 2000. Kemudian atas keinginan sendiri melanjutkan studi ke SLTPN 002 Singkep dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama beliau melanjutkan studi ke SMAN 001 Singkep dan tamat pada tahun 2006 dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

Awalnya beliau berminat untuk meneruskan studinya ke jenjang perkuliahan tepatnya pada jurusan Biologi atau Sastra Jepang, tetapi karena sesuatu hal dan berjalan sesuai dengan proses serta ketetapan Allah akhirnya beliau memilih Jurusan Administrasi Negara sebagai pilihan pertama dan Alhamdulillah pada tahun 2006 tersebut beliau lulus sebagai mahasiswa UIN Suska Riau dan dapat menjalankan aktifitas perkuliahannya dengan baik. Penulis adalah salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi di Jurusan Administrasi Negara, terbukti pada semester pertama beliau dapat tampil dengan nilai yang sangat memuaskan, IPK beliau mencapai 3,8. Dengan jumlah IPK yang sangat memuaskan tersebut akhirnya penulis melanjutkan perkuliahannya dengan penuh semangat dan rasa percaya diri yang kuat. Alhamdulillah cita-cita untuk menjadi seorang birokrat dan politisi Islami yang handal akan segera diraihnya Insyaallah....

Semasa kuliah penulis aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan seperti: Aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara sebagai Bendahara Umum periode 2006-2007. Aktif di organisasi keislaman yaitu rohis fakultas ISC Al-Iqtishodi sebagai Anggota Keputrian periode 2007, Koordinator Humas Akhwat periode 2008, dan menjadi Badan Penasehat (BP) periode 2009-2010. Beliau juga aktif di organisasi tertinggi UIN Suska Riau yaitu Dewan Mahasiswa dan menjabat sebagai Koordinator Dirjen Pemberdayaan Wanita periode 2008-2009. Dan beliau juga aktif di organisasi ekstra kampus seperti KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) Uin Suska Riau dan IMKL (Ikatan Mahasiswa Kabupaten Lingga).

Menjadi presenter adalah salah satu bidang yang sangat disenanginya selain dari pada bidang seni. Penulis berusaha untuk bisa menjadi yang terbaik dan memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk semuanya, Insyaallah..Allahuakbar.